

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah otonom yang ada di wilayah Jawa Barat. Kabupaten yang terdiri dari 27 Kecamatan ini memiliki luas wilayah yang cukup luas, dimana sebagian besarnya didominasi oleh area perhutanan dan pertanian. Kabupaten Sumedang sebagian besar wilayahnya sudah dikelola oleh masyarakatnya yang tentunya didominasi pula oleh bidang pertanian dan persawahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang memiliki sumber daya alam yang memadai yang siap untuk diolah. Meskipun didominasi oleh bidang pertanian, akan tetapi sedikit demi sedikit sudah merambah kebidang industri. Hal ini juga diikuti dengan adanya pembangunan diberbagai sektor mulai dari pabrik-pabrik industri, area perumahan, hingga infrastruktur-infrastruktur masyarakat seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Kecamatan Jatigede merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Jarak antara Kecamatan Jatigede dengan Sumedang Kota sekitar 32 Km. Luas wilayah Kecamatan Jatigede ialah 8.269,33 ha. Salah satu kecamatan paling timur Sumedang ini memiliki sebelas desa yang mana diduduki oleh sekitar 23.000 penduduk. Mayoritas penduduk di Kecamatan Jatigede bermatapencarian sebagai petani. Dalam beberapa tahun terakhir kecamatan yang namanya dijadikan sebagai nama waduk ini cukup disoroti. Hal tersebut memang tidak jauh dari adanya pembangunan sebuah waduk yang cakupan wilayahnya mencakup juga wilayah Kecamatan Jatigede.

Hal lain yang juga banyak disoroti di Kecamatan Jatigede ini ialah mengenai infrastruktur sosial masyarakatnya. Infrastruktur sosial masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jatigede masih dirasa belum memenuhi setiap kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, ataupun agama. Dari data yang ada dalam beberapa tahun terakhir infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede justru mengalami penurunan. Padahal infrastruktur sosial masyarakat tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai fasilitas untuk memajukan masyarakat di Kecamatan Jatigede itu sendiri.

Tabel 1.1 Infrastruktur Sosial Masyarakat

Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tahun 2011 s.d 2015

Tahun	Infrastruktur Sosial Masyarakat					
	Sekolah	Mesjid dan Mushola	Puskesmas dan Pustu	Warung dan Toko	Jembatan	Kerusakan Jalan (%)
2011	30	111	6	54	90	52,64
2012	30	111	6	336	90	37,92
2013	30	102	6	170	90	23,00
2014	27	102	6	170	90	39,92
2015	25	90	5	371	85	66,88

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang 2012-2016)

Apabila melihat data diatas, terjadi penurunan angka infrastruktur sosial masyarakat pada beberapa sektor. Pada sektor pendidikan terjadi penurunan jumlah sekolah dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Sementara pada sektor keagamaan terjadi penurunan jumlah mesjid dan mushola dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan 2014 ke tahun 2015. Dibidang kesehatan terdapat pula penurunan jumlah puskesmas dan pustu dari tahu 2014 ke tahun 2015. Sementara itu jumlah warung dan toko di Kecamatan Jatigede mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Adapun jumlah jembatan sebagai salah satu akses penghubung masyarakat antar wilayah mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Sementara akses penghubung lainnya yaitu jalan mengalami penurunan tingkat kerusakan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013, namun kerusakan tersebut kembali meningkat di tahun 2014 yang bahkan kembali meningkat di tahun 2015. Banyaknya penurunan jumlah infrastruktur sosial masyarakat tentu tidak akan serta merta terjadi. Pasti akan ada berbagai faktor yang mengakibatkan hal tersebut.

Salah satu yang menjadi faktor dari berkurangnya infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede ialah karena adanya pembangunan Waduk Jatigede. Kecamatan Jatigede sendiri kehilangan 760,55 ha dari total luas wilayahnya akibat pembangunan waduk jatigede. Pembangunan waduk Jatigede merupakan salah satu program pemerintah untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang ada. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah di dalam pembangunan yaitu dengan dilakukannya pembangunan waduk. Dalam rangka

pembangunan waduk tersebut, pemerintah telah mensosialisasikan berbagai keunggulan pembangunan waduk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan Pasal 4 ayat 1 dan 2 : (1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. Dan ayat (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk menyediakan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 pasal 4 ayat 1 dan 2).

Ide pembangunan waduk Jatigede pertama kali diajukan pada tahun 1963 oleh pemerintah, kemudian ditindak lanjuti dengan *Detail Design (DED)* pada tahun 1968 oleh konsultan *Small and Medium Enterprise Credit (SMEC)*, Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh konsultan PT. Indra Karya JO serta PT. Wiratama dan telah mendapatkan sertifikat desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada Tahun 23 Ferbruari 2006. (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jatigede, 2011). Dan pada tahun 2014 waduk Jatigede ini mulai digenangi secara menyeluruh sekaligus mulai dioprasikan juga.

Seperti dikemukakan di atas, pembangunan waduk – yang salah satunya ialah waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Akan tetapi dalam implementasinya tidak semulus yang diharapkan. Ada berbagai hal yang perlu

dikorbankan dalam pembangunan waduk Jatigede ini, misalnya saja lahan masyarakat, situs-situs budaya masyarakat, dan juga infrastruktur sosial masyarakat. Tentu saja hal ini mendatangkan banyak pro-kontra dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sekitar hingga para pengamat negeri.

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai seberapa besar **“PENGARUH PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP INFRASTRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa:

1. Terdapat beberapa tahun dimana jumlah infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede mengalami penurunan, yakni pada tahun 2014 dan 2015.
2. Pembangunan infrastruktur sosial masyarakat masih lambat, itu terlihat dari jumlah infrastruktur sosial masyarakat dari tahun ke tahunnya.
3. Kurang diperhatikannya berbagai aspek sosial dalam pembangunan waduk Jatigede sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra.
4. Hilangnya lahan sebesar 760,55 ha dari total 8.269,33 ha di Kecamatan Jatigede untuk pembangunan waduk Jatigede.
5. Terendam serta tergunanya sebagian infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede akibat adanya pembangunan waduk Jatigede.

6. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede selepas pembangunan waduk Jatigede.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga serta memelihara infrastruktur sosial masyarakat yang telah ada.
8. Jarak yang jauh dari pusat kota serta jalur transportasi yang belum memadai sehingga menghambat pembangunan infrastruktur sosial masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kekaayaan rata-rata terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?
2. Seberapa besar pengaruh pemerataan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas kehidupan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?
4. Seberapa besar pengaruh kerusakan lingkungan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?
5. Seberapa besar pengaruh keadilan sosial dan kesinambungan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?
6. Seberapa besar pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kekaayaan rata-rata terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemerataan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas kehidupan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kerusakan lingkungan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan sosial dan kesinambungan terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat di Kecamatan Jatigede.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

1. Bagi peneliti, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori pembangunan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur sosial masyarakat.
2. Bagi institusi/lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi peneliti untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil studi pembangunan yang dikaitkan dengan pembangunan waduk Jatigede.
2. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Grigg (1988) dalam Kodoatie (2005:8) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Adapun infrastruktur sosial merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan agar setiap orang bisa meningkatkan derajat hidupnya, termasuk dalam hal memperoleh kesejahteraan yang memadai. Infrastruktur sosial yang dimaksud diantaranya ialah rumah ibadah, sekolah serta rumah sakit, dimana dengan adanya sarana tersebut masyarakat di suatu daerah bisa meningkatkan kualitas hidupnya (Susanto, 2012:198).

Grigg dan Fontane (2000) dalam Kodoatie (2005:101) kategori infrastruktur sosial masyarakat:

1. Transportasi dan Pelayanan Transportasi
2. Gedung Publik

Sondang P. Siagian (2016:4) mengatakan bahwa pembangunan dapat didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Siagian (2016:4-5) terdapat tujuh ide pokok pembangunan atas definisinya tersebut, ide-ide pokok itu ialah sebagai berikut:

- a. Adanya proses
- b. Upaya yang secara sadar untuk dilaksanakan
- c. Adanya rencana, baik dalam arti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- d. Terciptanya pertumbuhan dan perkembangan
- e. Mengarah kepada modernitas
- f. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional

- g. Adanya usaha pembinaan bangsa (keberlanjutan).

Sementara Harun dan Ardianto (2012:251) mengatakan bahwa pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di suatu wilayah. Yaitu dengan terciptanya hal-hal berikut:

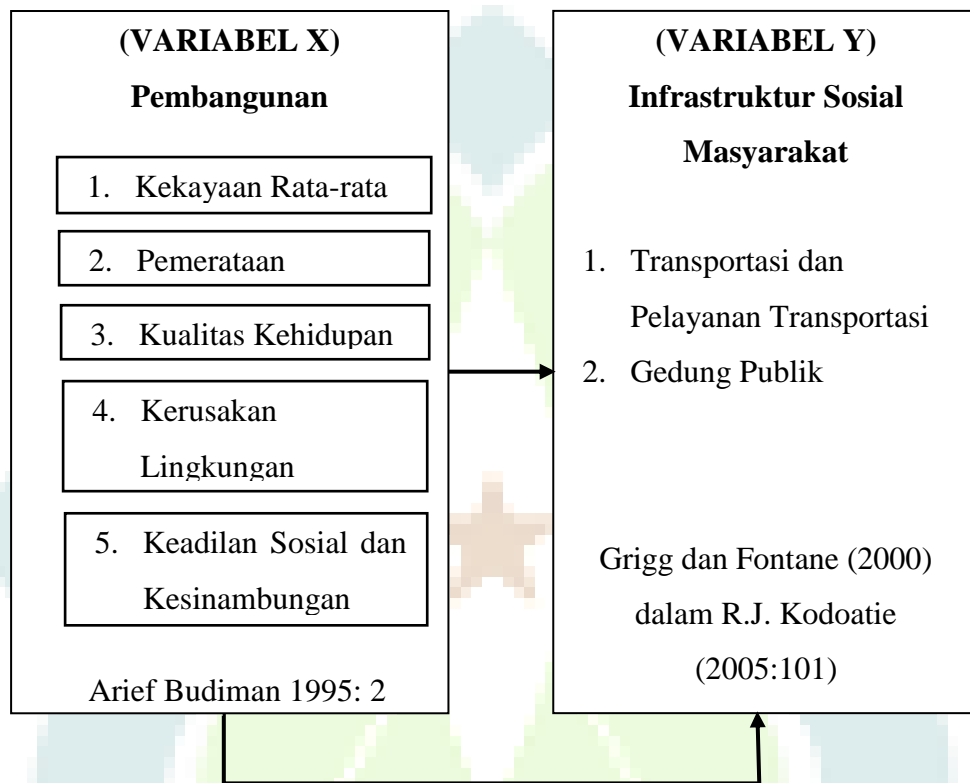
- a. Meningkatkan surplus dari yang berpotensi dalam bidangnya
- b. Kenaikan upah kerja
- c. Meningkatnya layanan umum
- d. Meningkatnya desentralisasi

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya. Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan masyarakat di bidang ekonomi. Akan tetapi pembangunan sebenarnya tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan (Budiman, 1995:1).

Berikut merupakan variabel yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan (Budiman, 1995:2) :

1. Kekayaan Rata-rata
2. Pemerataan
3. Kualitas Kehidupan
4. Kerusakan Lingkungan
5. Keadilan Sosial dan Kestinambungan

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti

1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:70) yang mengatakan bahwa:

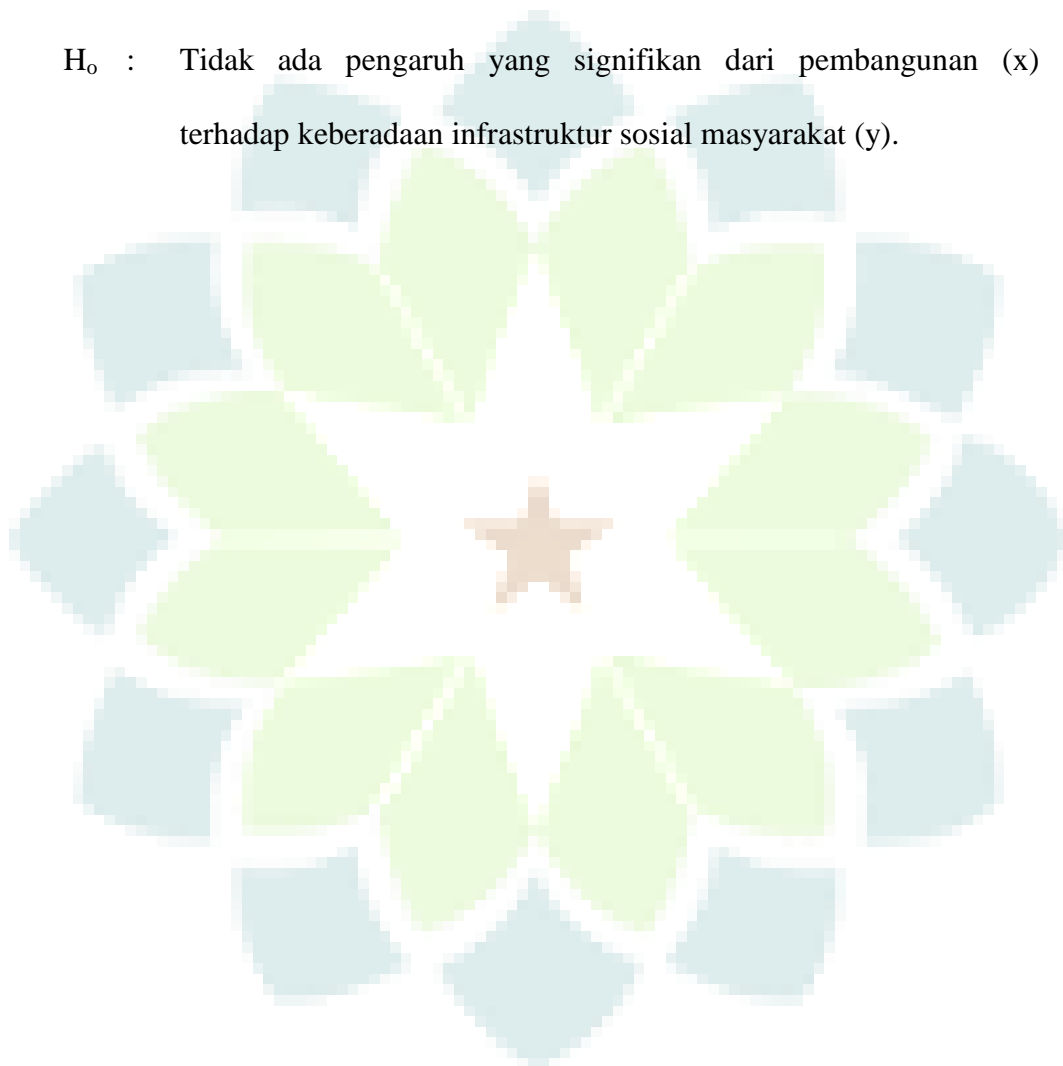
“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.”

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosatif. Hipotesis asosatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2011:77)

1. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari kekayaan rata-rata (x_1) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
 H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kekayaan rata-rata (x_1) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
2. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari pemerataan (x_2) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
 H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemerataan (x_2) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
3. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari kualitas kehidupan (x_3) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
 H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kualitas kehidupan (x_3) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
4. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari kerusakan lingkungan (x_4) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
 H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kerusakan lingkungan (x_4) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
5. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari keadilan sosial dan kesinambungan (x_5) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
 H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari keadilan sosial dan kesinambungan (x_5) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).
6. H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari pembangunan (x) terhadap

keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembangunan (x) terhadap keberadaan infrastruktur sosial masyarakat (y).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG